



**UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

**IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BELA NEGARA  
BAGI PNS KEMENKUMHAM RI DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL**

**IMRAN HASYIM  
NIM. 120200303011**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL  
PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK  
BOGOR  
2022**



**UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**




**IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BELA NEGARA  
BAGI PNS KEMENKUMHAM RI DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL**

**IMRAN HASYIM  
NIM. 120200303011**






**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL  
PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK  
BOGOR  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama	: Imran Hasyim
NIM	: 120200303011
Program Studi	: Damai dan Resolusi Konflik
Fakultas	: Keamanan Nasional
Judul Tesis	: Implikasi Kebijakan Pendidikan Bela Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Nasional
<p style="text-align: center;">Pembimbing I</p>  <p>Dr. Anang Puji Utama, S.H., M.Si NIP. 19630812 199203 1 001 Tanggal: 11/2/2022</p>	
<p style="text-align: center;">Pembimbing II</p>  <p>Dr. Bayu Setiawan, S.H., M.Si Kolonel Sus (Purn) Tanggal: 11/2/2022</p>	
<p style="text-align: center;">Mengetahui,</p> <p style="text-align: center;">Dekan Fakultas Keamanan Nasional</p>  <p>Dr. Syamsunasir, S.Sos., M.M., C.Fr.A Marsekal Muda TNI Tanggal: 14 / 02 / 2022</p>	

### LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Imran Hasyim NIM : 120200303011 Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik Fakultas : Keamanan Nasional Judul Tesis : Implikasi Kebijakan Pendidikan Bela Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Nasional			
No.	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I:  Dr. Anang Puji Utama, S.H., M.Si NIP. 19630812 199203 1 001		10 Februari 2022
2.	Pembimbing II:  Dr. Bayu Setiawan, S.H., M.Si Kolonel Sus (Purn)		11/2 2022
3.	Penguji I:  Dr. Djayeng Tirta S., S.Pi., SH., MH Laksda TNI (Purn)		6/2 '22
4.	Penguji II:  Dr. Achmed Sukendro, SH., M.Si Letkol Ckm NRP. 1910009590668		11/2 2022
5.	Penguji III:  Dr. Yulian Azhari, SH., MH Mayor Chk NRP. 11050021980778		03 Februari 2022

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya, juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat di dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, 06 feb 2022



Imran Hasyim

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya penyusunan tesis dengan judul: IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BELA NEGARA BAGI PNS KEMENKUMHAM RI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini dilakukan oleh Peneliti dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Magister Pertahanan pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini, Peneliti dengan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih kepada :

1. Laksamana Madya TNI Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., selaku Rektor Universitas Pertahanan Indonesia.
2. Marsda TNI Dr. Syamsunasir, S.Sos., M.M, C.Fr.A selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Indonesia.
3. Dr. Anang Puji Utama, S.H., M.Si, selaku Pembimbing I.
4. Kolonel Sus (Purn) Dr. Bayu Setiawan, S.H., M.Si, selaku Pembimbing II.
5. Kolonel Laut (E) Dr. Ir. Agus Adriyanto, ST., MM., MTr. Opsla., CIQnR., CIQaR., IPU, selaku Sekretaris Program Studi Damai dan Resolusi Konflik.
6. Kolonel Ckm Dr. Achmad Sukendro, SH.,M.Si, selaku Plh. Sekretaris Program Studi Damai dan Resolusi Konflik.

Selain itu terima kasih juga kepada Balai Pemasarakatan Klas II Bengkulu atas izin belajar dan Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Ditjen Pemasarakatan, Setjen Kemenkumham RI atas penugasan belajar bagi kami. Juga terima kasih kepada Direktorat Bela Negara Kemhan RI,

Pusdiklat Bela Negara, LAN RI dan BPSDM Hukum dan HAM atas perkenan diambil datanya. Tak luput Peneliti juga menyampaikan rasa sayang dan terima kasih tak terhingga kepada Kepada Bapak dan Ibu Mertua, isteri tercinta Mekka Madaina Jamil, beserta dua orang putra tercinta yang luar biasa, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan tesis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan – kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi *stakeholder* terkait dalam upaya pendidikan bela negara.

Bogor, 14 Februari 2022

Imran Hasyim

## ABSTRAK

### IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BELA NEGARA BAGI PNS KEMENKUMHAM RI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL

IMRAN HASYIM

Setiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam usaha bela negara. Penerapan 5 nilai dasar bela negara sebagai unsur penting dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan tolak ukur capaian pendidikan bela negara. Berkembangnya dinamika permasalahan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagai ancaman keamanan nasional. Dari permasalahan tersebut penelitian ini menganalisa bagaimana kebijakan pendidikan bela negara, faktor apa yang menghambat penerapan kebijakan pendidikan bela negara dan bagaimana strategi dalam mengoptimalkan pendidikan bela negara di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan guna menjawab permasalahan diatas menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara deskripsi, pengumpulan data melalui wawancara kepada Direktorat Bela Negara Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Pusat pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Hukum dan Hak Azasi Manusia dan studi literatur terhadap penelitian terdahulu. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai pelaksana pendidikan bela negara kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia telah dengan baik menjalankan kebijakan tersebut. Tidak ditemukan faktor menghambat penerapan kebijakan pendidikan bela negara bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Hukum dan Hak Azasi Manusia membuka diri untuk berkordinasi dan berkolaborasi dalam pengembangan materi pembelajaran pendidikan bela negara. Hasil penelitian ini juga menyarankan kepada pihak terkait untuk rutin berkordinasi dalam pendidikan bela negara. Serta khusus Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia agar dapat membuat kebijakan internal terkait penyelenggaraan pendidikan bela negara di lingkungannya.

**Kata Kunci:** Pendidikan Bela Negara, Keamanan Nasional, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia

## **ABSTRACT**

### ***IMPLICATION OF STATE DEFENSE EDUCATION POLICY FOR CIVIL SERVANTS MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE ORDER TO ACHIEVE NATIONAL SECURITY***

IMRAN HASYIM

Every citizen has the right and obligation to participate in national defense efforts. The application of the 5 basic values of state defense as an important element in Fostering State Defense Awareness is a benchmark for achieving state defense education. The development of the dynamics of the problems of Civil Servants of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as a threat to national security. From these problems, this research analyzes how the education policy is in defending the state, what factors hinder the implementation of the education policy in defending the state and how the strategy is in optimizing state defense education at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The research method used to answer the above problems uses a qualitative approach by means of description, data collection through interviews with the Directorate General of State Defense, Directorate General of Defense Potential of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia, the State Administration of the Republic of Indonesia, Education and Training Center for State Defense Education and Training Agency of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia. Indonesia and the Human Resources Development Agency for Law and Human Rights and literature studies on previous research. So that it can be concluded that the Legal and Human Rights Human Resources Development Agency as the implementer of state defense education for Civil Servants of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has properly implemented this policy. No factors were found to hinder the implementation of the state defense education policy for Civil Servants of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The Human Resources Development Agency for Law and Human Rights is open to coordinating and collaborating in the development of learning materials for state defense education. The results of this study also suggest related parties to routinely coordinate in state defense education. And specifically the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in order to be able to make internal policies related to the implementation of state defense education in their environment.

**Keywords:** State Defense Education, National Security, Civil Servant Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTATABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus dan Subfokus.....	13
1.3 Rumusan Masalah.....	14
1.4 Tujuan Penelitian.....	15
1.5 Manfaat Penelitian.....	15
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	15
1.5.2 Manfaat Praktis.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
2.1 Landasan Teori.....	17
2.1.1 Teori Keamanan Nasional.....	18
2.1.2 Teori Bela Negara.....	22
2.1.3 Teori Pendidikan.....	23
2.1.4 Teori Kebijakan.....	25
2.1.5 Teori Birokrasi.....	27
2.1.6 Teori Ekskalasi Glasl.....	31
2.1.7 Teori Strategi.....	33

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	37
2.3 Kerangka Pemikiran.....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
3.1 Metode dan Desain Penelitian.....	42
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
3.3 Subyek dan Obyek Penelitian.....	44
3.3.1 Subyek Penelitian.....	44
3.3.2 Obyek penelitian.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data.....	45
3.6 Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	49
4.2 Hasil Pengumpulan Data.....	50
4.2.1 Kebijakan Pendidikan Bela Negara di Lingkungan Kemenkumham RI.....	51
4.2.2 Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Penerapan Kebijakan Bela Negara di Kemenkumham RI.....	58
4.2.3 Strategi dalam Mengoptimalkan Pendidikan Bela Negara di Kemenkumham RI.....	61
4.3 Hasil Pengolahan Data.....	63
4.3.1 Kebijakan Pendidikan Bela Negara di Lingkungan Kemenkumham RI.....	64
4.3.2 Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Penerapan Kebijakan Bela Negara di Kemenkumham RI.....	66
4.3.3 Strategi dalam Mengoptimalkan Pendidikan Bela Negara di Kemenkumham RI.....	67
4.4 Interpretasi Data.....	68

4.4.1	Kebijakan Pendidikan Bela Negara di Lingkungan Kemenkumham RI.....	69
4.4.2	Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Penerapan Kebijakan Bela Negara di Kemenkumham RI.....	70
4.4.3	Strategi dalam Mengoptimalkan Pendidikan Bela Negara di Kemenkumham RI.....	72
4.5	Pembahasan.....	73
4.5.1	Kebijakan Pendidikan Bela Negara di Lingkungan Kemenkumham RI.....	73
4.5.2	Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Penerapan Kebijakan Bela Negara di Kemenkumham RI.....	77
4.5.3	Strategi dalam Mengoptimalkan Pendidikan Bela Negara di Kemenkumham RI.....	79
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>82</b>
5.1	Kesimpulan.....	82
5.2	Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>87</b>
<b>LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA.....</b>		<b>90</b>
<b>LAMPIRAN 2 INSTRUMEN WAWANCARA.....</b>		<b>99</b>
<b>LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI PENDUKUNG WAWANCARA.....</b>		<b>120</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Rumusan Masalah dan Landasan teori.....	17
Gambar 2.2 Teori Model Keamanan Nasional.....	19
Gambar 2.3 Sudut Pandang Sistem dalam Perumusan Peraturan Sistem Pertahanan Nasional.....	34
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 3.1 Model Interaktif Analisis.....	45

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kumpulan Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	43

